

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Shafa Humaira

shafahumaira2003@gmail.com

Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines the effect of local-owned source revenue, economic growth, and the number of people who own it on the independence level of local finances in districts/cities in Gerbangkertosusila. The ratio of local-owned source revenue measured local-owned Source Revenue, the ratio of economic growth measured economic growth, the number of people was measured by the ratio of the number of dependent people, and the local finance independence level measured the ratio of local finance independence level. The research applies quantitatively. Furthermore, the population consists of districts/cities in Gerbangkertosusila. The data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on the criteria given. In line with that, there were 7 districts/cities. Moreover, the data were taken for 5 years (2019-2023). Therefore, there were 35 data samples. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26. The result indicates that local-owned source revenue has a positive effect on the local finance independence level. However, economic growth does not have a negative effect on the local finance independence level. Meanwhile, the number of people does not affect positively the level of local finance independence level.

Keywords: local-owned source revenue, economic growth, number of people, and local finance independence level

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila. Pendapatan asli daerah diukur menggunakan rasio pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan rasio pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk diukur menggunakan rasio ketergantungan jumlah penduduk dan tingkat kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila. Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode *purposive sampling* didapatkan sampel sebanyak 7 Kabupaten/Kota. Data penelitian diambil selama 5 tahun, yaitu tahun 2019-2023, sehingga diperoleh 35 data yang diolah. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat kemandirian keuangan daerah

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kinerja dan hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara mandiri terutama hal pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan publik yang

maksimal namun tentunya tidak lepas dari pengawasan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggali sumber daya keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus sekecil mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber permodalan utama sehingga meningkatkan peranan pemerintah daerah. Kawasan Gerbangkertosusila ini merupakan wilayah strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Wilayah ini terbilang fungsional karena terdiri dari beberapa kabupaten/kota yang saling berhubungan dengan Kota Surabaya sebagai pusatnya dan kabupaten/kota lainnya yang mampu mendukung kegiatan pembangunan daerah. Selain itu, masing-masing daerahnya memiliki potensi sumber daya yang tinggi. Akan tetapi, masih banyak kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota Gerbangkertosusila. Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan (Sari, 2021) bahwa tingkat kemandirian keuangan yang rendah menunjukkan bahwa lemahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangkalan yang dimana masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Penelitian lain yaitu (Suwito dan Hidayat, 2023) juga mengatakan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan paling rendah pada sebelum dan semasa pandemi yaitu masing-masing sebesar 14% dan 28%.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan keuangannya secara mandiri serta dapat merencanakan dan mengelola anggarannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Secara umum permasalahan perekonomian pemerintah daerah di Indonesia adalah memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang relatif kecil. Pemerintah mempunyai peran penting dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah seperti mengelola pendapatan daerah, kekayaan daerah, dan sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat. Dengan menggunakan sumber daya keuangan secara optimal, maka daerah tersebut bisa bersaing dengan daerah lain untuk mencapai otonomi daerah (Samudra dan Handayani, 2020:2).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber penerimaan daerah wilayahnya sendiri dan sangat menggambarkan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah daripada pendapatan transfer dari pusat maka dapat dikatakan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut cukup tinggi. Masyarakat harus membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama untuk mencapai peningkatan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah sanggup mendanai secara mandiri seluruh pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Jika suatu daerah dapat dikatakan mandiri dan mampu mengalokasikan dana secara optimal kepada daerah-daerah kecil di bawah naungannya. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah sangat diharapkan untuk mendukung seluruh program atau aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah serta dapat menjadi sumber modal utama dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan pendapatan atau hasil produksi dari suatu negara yang terjadi bertahap dari tahun ke tahun. Perekonomian yang meningkat akan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat, yang dimana pendapatan masyarakat bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan suatu daerah. Memastikan perekonomian yang diinginkan agar masyarakat memahami apa yang dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan perluasan lapangan kerja, karena jika tidak didukung dengan lapangan kerja maka akan menimbulkan ketimpangan pendapatan yang dapat

menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Hal ini juga berhubungan dengan jumlah penduduk pada Kawasan Gerbangkertosusila yang sangat padat.

Jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena penduduk juga dapat sebagai peningkatan usaha produksi dan sebagai penyedia tenaga kerja (Samudra dan Handayani, 2020:3). Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah maka potensi penerimaan pajak dan retribusi yang berasal dari masyarakat semakin besar juga. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi, tetap melihat dari beban yang ditanggung penduduk usia produktif atas kebutuhan hidup penduduk usia nonproduktif agar dapat memberikan kontribusi yang baik kepada pembangunan pemerintah dan kemandirian keuangan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tentang tingkat kemandirian keuangan daerah dengan variabel dan hasil yang berbeda. Penelitian yang telah dilakukan oleh Malau dan Parapat (2020:336) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian Rofiq dan Arza (2021: 717) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?, (2) apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?, (3) apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah?. Tujuan dari penelitian yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: (1) untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (2) untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, (3) untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana manajer didorong untuk mencapai tujuan utama mereka bukan didorong untuk kepentingan individu, sehingga teori ini mempunyai dasar sosiologis dan psikologis yang disusun oleh manajer sebagai *steward* yang didorong untuk berperan (Pratiwi *et al.*, 2018). Peran pemerintah sebagai *steward* mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan yang baik upaya bentuk menyejahterakan masyarakat sebagai *principal*.

Teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam organisasi dapat diraih dengan melaksanakan tugas secara efektif dan efisien untuk mencapai kepuasan kepada para pemangku kepentingan dan pengelola organisasi (Jefri, 2018). Teori ini juga cocok digunakan untuk penelitian ini karena menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri demi kesejahteraan masyarakat sesuai amanah yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi memiliki hubungan yang erat dalam teori *stewardship* ini.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini agar pemerintah pusat dapat menilai sejauh mana daerah tersebut sudah mandiri dalam apapun termasuk pengelolaan keuangannya. Manfaat adanya otonomi daerah adalah

mengurangi beban pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat tidak perlu menanggung seluruh biaya penyelenggaraan pemerintah daerah karena pembiayaan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri.

Keunggulan dari otonomi daerah adalah mematangkan otonomi daerah untuk mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan bersama. Sedangkan kelemahannya adalah kemungkinan timbul konflik kepentingan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai ketidakrelevanan peraturan yang dibuat pemerintah pusat dengan keadaan suatu daerah (Shoba dan Fidiana, 2022:3-4).

Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Keuangan Daerah yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Daerah diberikan akses terhadap sumber daya keuangannya termasuk pengakuan bantuan dana dari pemerintah pusat, serta hak untuk mengelola kekayaan daerah. Pentingnya mengatur keuangan daerah dalam otonomi daerah yaitu mendorong pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan posisi perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan menggambarkan posisi perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Serta menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode tahun anggaran. Adapun beberapa komponen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah tingkat untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri. Kemandirian keuangan dapat dikatakan tinggi apabila pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat. Begitu pula jika kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan rendah apabila pemerintah daerah masih selalu bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah harus selalu memperhatikan pengelolaan keuangannya sendiri. Serta masyarakat juga ikut berpartisipasi membantu daerahnya mandiri dengan cara taat membayar kewajiban sebagai warga negara Indonesia yaitu membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 1
Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: (Halim, 2007)

Menurut Halim (2007) dalam Tabel 1 dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut: (1) pola hubungan instruktif yaitu peran pemerintah pusat

sangat dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, (2) pola hubungan konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, dan pemerintah daerah dianggap mulai mampu melaksanakan otonomi daerah, (3) pola hubungan partisipatif yaitu peran pemerintah pusat sudah semakin berkurang karena daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah cukup mampu melaksanakan otonomi daerah, (4) pola hubungan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak dominan lagi karena daerah sudah benar benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yaitu hak yang diperoleh daerah yang dipungut dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa komponen dalam pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber pendapatan asli daerah yang utama adalah pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga untuk membuat suatu daerah itu mandiri hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kedua sumber tersebut. Melaksanakan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga daerah tidak hanya bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat. Daerah juga harus mampu menemukan kapasitas daerahnya untuk mendukung dari seluruh dana yang digunakan dalam meningkatkan pendapatannya.

Tabel 2

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah atau Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00 %	Sangat kurang
10,01 - 20,00 %	Kurang
20,01 - 30,00 %	Sedang
30,01 - 40,00 %	Cukup
40,01 - 50,00 %	Baik
> 50,01 %	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam (Siregar dan Mariana, 2020: 7)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah secara menyeluruh, peningkatan pendapatan tersebut dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2012). Pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ekonomi suatu negara dalam rangka mendorong taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menciptakan dan membuka lapangan kerja baru. Tentunya dalam mewujudkan upaya tersebut partisipasi masyarakat juga dibutuhkan. Dari sektor ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah sektor-sektor dengan berkontribusi melalui pajak daerah agar pendapatan asli daerahnya juga tinggi. Pemerintah harus meningkatkan PDRB guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya serta memanfaatkan perusahaan yang beroperasi untuk mendorong peningkatan jumlah PDRB.

Jumlah Penduduk

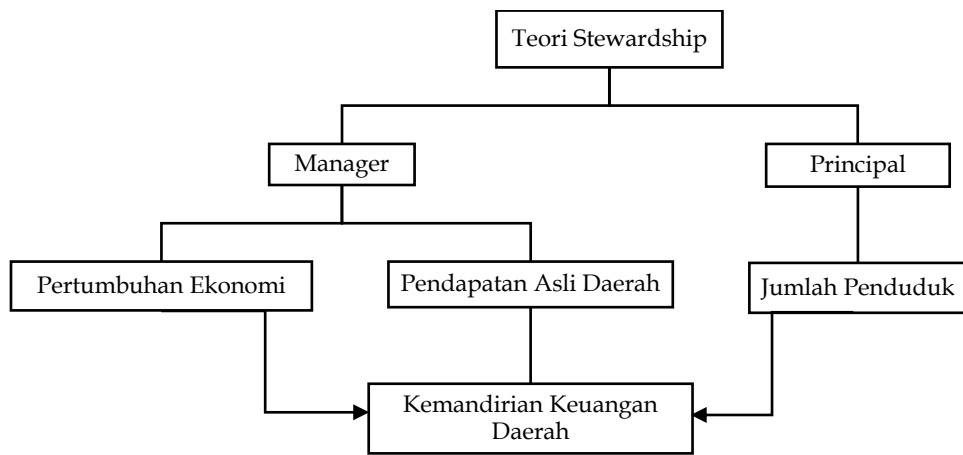
Penduduk yang banyak berarti pasar domestik yang luas dan daya beli masyarakat yang besar. Hal ini menimbulkan pertumbuhan produksi barang dan jasa oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, tenaga kerja yang melimpah juga mendorong peningkatan produktivitas dan pembangunan ekonomi. Semakin banyak penduduk berarti

semakin banyak pula sumber daya manusia yang dapat diolah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan penduduk harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan.

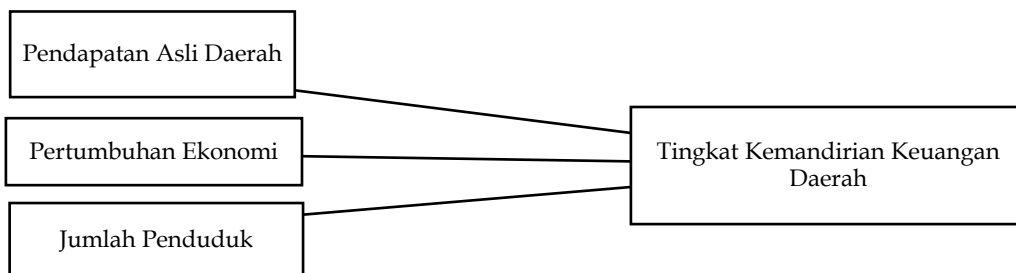
Hal ini juga dapat dilihat dari perbandingan usia penduduk yang produktif (15-64 tahun) dan nonproduktif (0-14 dan 65+ tahun). Semakin besar persentase rasio ketergantungan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam memenuhi kebutuhan penduduk usia nonproduktif. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan solusi kepada masyarakat dengan menggunakan anggaran dengan bijak sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan lapangan kerja (Samudra dan Handayani, 2020:6-7). Sehingga jumlah penduduk usia produktif yang juga menanggung beban atas penduduk usia nonproduktif tidak lagi menjadi masalah bagi pemerintah melainkan menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kegiatan perekonomian dan pendapatan daerah.

Rerangka Pemikiran dan Rerangka Konseptual

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disusun rerangka pemikiran dan rerangka konseptual pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1
Rerangka Pemikiran



Gambar 2
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan utama yang dipungut dari suatu daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda karena adanya perbedaan dari faktor ekonomi, sumber daya alam, dan jumlah penduduk. Karena pendapatan asli daerah yang tinggi menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerahnya untuk menghasilkan pendapatan. Kemandirian suatu daerah tercermin dari peningkatan pendapatan asli daerah dan mampu melaksanakan otonomi daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Shoba dan Fidiana (2022) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut berarti apabila pendapatan asli daerahnya sendiri lebih besar dari sumbangan dana pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan telah mandiri dari segi sumber daya keuangannya. Dan diperkuat lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Ardini (2018) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pertumbuhan ini menggambarkan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, meningkatnya pendapatan serta kualitas taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong naiknya investasi di daerah, domestik maupun asing. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor investasi dan menjadi kesempatan bagi daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya, serta naiknya PDRB memungkinkan tingkat kemandirian keuangan daerahnya juga meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Karouw *et al.*,2022) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk. Faktor lain yang mempengaruhi adalah pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto (PDRB). Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan daerah dari berbagai sektor ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan perbandingan PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan.

H₂: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa salah satu indikator penentuan kebutuhan fiskal adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Jumlah penduduk dapat dianggap sebagai aset yang tinggi dalam pembangunan tetapi juga dapat dianggap beban yang besar dalam perencanaan pembangunan. Dengan jumlah penduduk yang besar, aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli di masyarakat juga kemungkinan meningkat sehingga dapat menambah objek pajak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. Selain itu, populasi penduduk yang besar juga dapat mendorong perkembangan UMKM, yang dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Pemerintah juga dapat memanfaatkan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong tingkat kemandirian keuangan daerah tinggi.

Jumlah penduduk usia produktif yang besar dianggap menjadi pendorong kemandirian keuangan daerah serta jika dilihat dari beban yang ditanggung penduduk usia produktif atas kebutuhan dari penduduk usia nonproduktif tidak terlalu besar dan memiliki potensi sumber daya manusia yang optimal, serta dapat menguntungkan bagi perencanaan pembangunan, namun sebaliknya jika jumlah penduduk yang besar tidak memiliki potensi sumber daya manusia yang optimal, maka tidak dapat membantu daerah dalam perencanaan pembangunan. Pertumbuhan populasi penduduk juga perlu dikelola secara baik agar kemandirian keuangan daerahnya tetap terjaga dan berkembang secara berkelanjutan. Dalam penelitian Rofiq dan Arza (2021) mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H₃: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, obyektif terukur, rasional, serta sistematis (Sugiyono, 2019). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Gerbangkertosusila yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023 yang terdiri 5 Kabupaten dan 2 Kota. Objek dari penelitian ini adalah laporan realisasi APBD, data PDRB, dan data proyeksi penduduk.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2018:138) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Adapun sampel yang diambil dari populasi dalam penelitian ini, yaitu: (1) laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila yang berada di Provinsi Jawa Timur yang dipublikasikan pada *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia (www.djpk.menkeu.go.id) pada tahun 2019-2023, (2) data PDRB dan data proyeksi penduduk Pemerintah Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila yang berada di Provinsi Jawa Timur yang dipublikasikan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur selama 2019-2023.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD, data PDRB, dan data proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila yang berada di Provinsi Jawa Timur selama 2019-2023. Data tersebut diperoleh melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia (www.djpk.menkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan data dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh oleh pihak lain). Sedangkan dari segi waktu pengumpulannya, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *time series*. Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif karena data yang akan diperoleh berupa angka-angka.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel Kemandirian Keuangan Daerah

Besar kecilnya pendapatan asli daerah daripada pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007) untuk mengukur rasio tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber, baik dari sumber-sumber pungutan daerah maupun yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk pembiayaan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010) rasio pendapatan asli daerah untuk mengukur kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dalam perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. Nilai tambah yang dimaksud adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Menurut (Weriantoni *et al.*,2024) untuk menghitung pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor utama dalam perekonomian. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin banyak sumber daya manusia yang tersedia untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Indikator jumlah penduduk juga dapat dihitung menggunakan rasio ketergantungan. Menurut Mantra (2000) rasio ketergantungan dalam jumlah penduduk dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penduduk} = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah metode statistik untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu data yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik data secara umum. Hasil dari analisis ini biasanya berupa diagram, gambar, maupun tabel. Tujuan dari analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai alat pembandingan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menentukan normalnya distribusi residual yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam analisis grafik yang digunakan yaitu grafik *normal probability plot*. Menurut Ghozali

(2018:161) apabila distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data akan menyebar dan mengikuti arah garis diagonalnya. Sedangkan, apabila distribusi data residual tidak normal, maka garis yang menggambarkan data akan menjauhi dan tidak mengikuti arah garis diagonalnya. Uji Kolmogorov-Sminov merupakan non parametrik statistik. Pengujian ini bertujuan untuk menguji normalitas residual. Kriteria dalam pengujian kolmogorov sminov ini adalah apabila nilai kurang dari 0,05 maka data yang diuji tidak normal, sedangkan jika nilai lebih dari 0,05 maka data yang diuji normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah ditemukannya atau tidak korelasi antar variabel independen pada model regresi yang dibuat. Kriteria dalam pengujian ini adalah nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan tolerance value. Apabila tolerance value $> 0,10$ dan VIF < 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak ditemukannya gejala multikolinearitas. Sebaliknya, jika tolerance value $< 0,10$ dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel pengganggu (error/residual) memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah varian dari residual satu ke residual yang lain tetap atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2018:138) menyatakan bahwa melalui gambar *Scatterplot* dapat mendeteksi adanya heteroskedastisitas antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan variabel residualnya (SRESID). Apabila terjadi heteroskedastisitas maka titik-titik data penyebarannya membentuk pola tertentu dan menyebar diatas atau dibawah angka 0.

Uji Autokorelasi

Pengujian ini untuk menguji asumsi apakah dalam regresi linear terjadi korelasi antara variabel dependen dengan dirinya sendiri. Adapun ketentuan dalam menentukan suatu model regresi tidak terdapat autokorelasi pada tabel 3.

Tabel 3
Autokorelasi

Hipotesis nol	Jika
Terdapat korelasi positif	Nilai DW dibawah -2
Tidak terdapat autokorelasi	Nilai DW diantara -2 sampai +2
Terdapat korelasi negatif	Nilai DW diatas +2

Sumber: (Samudra dan Handayani, 2020)

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel atau lebih yang dimana dapat menjelaskan ketergantungan variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan analisis regresi sebagai berikut:

$$TKKD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 PE + \beta_3 JP + e$$

Keterangan:

TKKD : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien dari variabel independen

PAD : Pendapatan asli daerah

PE : Pertumbuhan ekonomi

JP : Jumlah Penduduk

e : Error

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur besarnya persentase varian yang pengaruhnya ditunjukkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat sebagai acuan pengukuran besarnya persentase kebenaran dari uji regresi. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol (0) dan satu (1). Jika nilai koefisien determinasi regresi mendekati satu, maka semakin baik regresi tersebut, sedangkan apabila mendekati nol maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Uji F

Uji F disebut juga uji kelayakan model (*goodness of fit*). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan F hasil perhitungan dengan nilai tabel F. Menurut Ghozali (2018:98) kriteria dalam pengujian ini yaitu jika nilai signifikan $\leq 0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel, maka hipotesis dikatakan layak diterima sehingga variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan, jika nilai signifikan $\geq 0,05$ dan nilai F hitung $< F$ tabel, maka hipotesis dikatakan tidak layak diterima sehingga variabel independen tidak dapat mempengaruhi variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2018:98) pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Yang dimaksud adalah apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria penentuan keputusan dalam pengujian ini yaitu jika nilai signifikan $\leq 0,05$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, apabila nilai signifikan $\geq 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada tabel 4.

Tabel 4

	Hasil Statistik Deskriptif				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
PAD	35	10,89	61,40	30,1883	14,84260
PE	35	-5,59	7,53	2,8200	3,89976
JP	35	35,43	50,86	41,5986	2,45492
TKKD	35	12,96	168,71	54,3854	44,76083
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan dari tabel 4 dapat diketahui hasil analisis statistik deskriptif pada pendapatan asli daerah yang menunjukkan nilai minimum sebesar 10,89% dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 61,40% dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 30,1883% yang artinya masih tergolong cukup dimana daerah tersebut kurang mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Sedangkan, nilai standar deviasinya sebesar 14,84260%.

Pertumbuhan ekonomi dengan nilai minimum sebesar -5,59% dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena daerahnya tersebut pada tahun 2020 mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan dari pembatasan kegiatan sosial masyarakat dalam mengurangi angka penularan Covid-19 di tahun tersebut. Nilai maksimum sebesar 7,53% dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022. Hal ini terjadi

setelah pemulihan masa Covid-19 adanya peningkatan pada sektor perdagangan, jasa, dan pengolahan industri mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu pusat industri di Jawa Timur dengan banyaknya kawasan industri dan pabrik yang berada di daerah tersebut. Serta dari sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 2,8200% yang dimana pada tahun 2020 seluruh daerah cenderung mengalami penurunan ekonomi. Sedangkan, nilai standar deviasinya sebesar 3,89976%.

Jumlah penduduk dengan nilai minimum sebesar 35,43% dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 50,86% dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 41,5986% yang artinya setiap 100 jumlah penduduk produktif menanggung beban dari 42 jumlah penduduk nonproduktif dan nilai standar deviasinya sebesar 2,45492%.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai minimum sebesar 12,96% yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 168,71% dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 54,3854% tergolong sedang dan dikategorikan pada pola partisipatif yang artinya daerah tersebut dapat dikatakan mandiri dalam pembiayaan daerahnya dan nilai standar deviasinya sebesar 44,76083%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada pengujian normalitas dengan grafik normal P-P Plot dapat diketahui bahwa titik-titik atau data telah menyebar dekat dan disekitar garis diagonalnya serta mengikuti arah garis diagonal dan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,076 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diuji telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pada pengujian multikolinearitas yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel independen menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Untuk hasil nilai VIF untuk setiap variabel independen menunjukkan nilai kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Pada pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar merata dan tidak membentuk pola tertentu serta menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diuji tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pada pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson dengan nilai DW sebesar 1,092. Dapat dilihat pada tabel 3 autokorelasi menunjukkan nilai tersebut diantara -2 sampai +2. Pada penelitian ini nilai DW yaitu $-2 < 1,092 < +2$ sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengelolaan data menggunakan program SPSS diperoleh pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized	Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-85,165	37,016		-2,301	,028
PAD	3,072	,142	1,019	21,626	,000
PE	-,916	,491	-,080	-1,865	,072
JP	1,188	,839	,065	1,416	,167

a. Dependent Variable: TKKD

Sumber: Hasil *Output* SPSS 26

Berdasarkan tabel 5 dapat menyusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$TKKD = -85,165 + 3,072PAD - 0,916PE + 1,188JP + e$$

Dari persamaan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, koefisien dari variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai yaitu 3,072. Nilai koefisien tersebut menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang didapatkan, maka akan seiring dengan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan asli daerah semakin kecil, maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin kecil.

Kedua, koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai yaitu -0,916. Nilai koefisien tersebut menunjukkan arah hubungan yang negatif atau berlawanan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa jika semakin meningkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,916 maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin menurun sebesar 0,916. Yang memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang besar, maka tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi kecil. Begitupun sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi kecil, maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin besar.

Ketiga, koefisien dari variabel jumlah penduduk mempunyai nilai yaitu 1,188. Nilai koefisien tersebut menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif maka akan seiring dengan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, jika jumlah penduduk usia produktif menurun maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin menurun.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,947 atau 94,7%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel independent dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk dapat menjelaskan variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 94,7%. Sehingga sisanya sebesar 5,3% yaitu variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Dapat disimpulkan model tersebut layak untuk diterima.

Uji Hipotesis (Uji t)

Berdasarkan hasil dari tabel 5 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pengujian pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Nilai koefisien dari variabel pendapatan asli daerah mempunyai nilai yaitu 3,072. Nilai koefisien tersebut menunjukkan arah hubungan yang

positif. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang didapatkan, maka akan seiring dengan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan asli daerah semakin kecil, maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin kecil. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai nilai signifikan yaitu 0,000. Hal ini menjelaskan bahwa nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kedua, pengujian variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Nilai koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai yaitu -0,916. Nilai koefisien tersebut menunjukkan arah hubungan yang negatif atau berlawanan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa jika semakin meningkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,916 maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin menurun sebesar 0,916. Yang memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang besar, maka tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi kecil. Begitupun sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi kecil, maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin besar. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai signifikan yaitu 0,072. Hal ini menjelaskan bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Ketiga, pengujian pengaruh variabel Jumlah Penduduk (JP) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Nilai koefisien dari variabel jumlah penduduk mempunyai nilai yaitu 1,188. Nilai koefisien tersebut menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif maka akan seiring dengan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, jika jumlah penduduk usia produktif menurun maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin menurun. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai nilai signifikan yaitu 0,167. Hal ini menjelaskan bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Oleh karena itu, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas dapat diketahui bahwa H_1 yang berbunyi pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang memiliki arti semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut dalam membiayai kebutuhannya. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang paling utama dari suatu daerah. Sedangkan sumber utama dari pendapatan asli daerah biasanya diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerahnya sendiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah menggambarkan sejauh mana dalam suatu daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri terutama pada sektor pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tanpa mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah harus menggali potensi-potensi sumber penerimaan terutama pajak daerah dan retribusi daerah agar memberikan kekuatan anggaran untuk pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan dari nilai rata-ratanya sebesar 30,1883%, pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Gerbangkertosusila masih tergolong cukup dan terlebih pada saat tahun 2020 terjadi pandemi. Meskipun tergolong cukup namun daerah masih tetap mandiri karena telah membatasi belanjanya dan di tahun-

tahun berikutnya mengalami pemulihan dari masa pandemi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau dan Parapat (2020) yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat diketahui bahwa H_2 yang berbunyi pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam suatu daerah yang mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi pada waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk dapat meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat sehingga menjadi elemen penting bagi pembangunan ekonomi di suatu daerah. PDRB mampu menunjukkan kontribusi pada setiap sektor terhadap suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan apabila nilai PDRB tahun tertentu lebih besar daripada PDRB tahun sebelumnya. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka suatu daerah belum dikatakan mandiri karena belum mampu membiayai kebutuhannya sendiri.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif nilai minimum pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -5,59 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi seperti pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi seluruh daerah mengalami penurunan karena adanya pandemi covid 19 yang dibarengi pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga berkurangnya aktivitas ekonomi serta menurunnya permintaan masyarakat yang menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa. Tetapi setelah melewati masa pandemi seluruh daerah mengalami pemulihan pada kegiatan ekonominya masing-masing dengan meningkatnya kembali pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada wilayah Gerbangkertosusila justru dapat menyebabkan turunnya tingkat kemandirian keuangan daerah dikarenakan beberapa sektor ekonomi berskala besar seperti industri manufaktur, pertambangan, pertanian, perikanan, perhutanan yang berbasis ekspor lebih tinggi dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Artinya sektor tersebut dapat menghasilkan barang yang diekspor dan sering kali memberikan kontribusi lebih banyak kepada pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah melalui pajak ekspor sehingga pajak daerahnya tidak berkontribusi. Sedangkan pemerintah daerah hanya menerima bagian kecil melalui dana bagi hasil sehingga tidak berkontribusi pada pendapatan asli daerah dan tidak dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tolosang (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat diketahui bahwa H_3 yang berbunyi jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah penduduk usia produktif serta besar kecilnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif atas kebutuhan penduduk usia nonproduktif pada suatu daerah tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah karena meningkatkan produktivitas ekonomi sebagai tenaga kerja. Hal tersebut harus diiringi tenaga kerja yang berkualitas agar

dapat mengimbangi proses dalam pembangunan daerah. Jumlah penduduk yang besar juga harus disertai lapangan pekerjaan agar tidak terjadi penyimpangan. Hal ini dapat didukung dengan jumlah penduduk yang usia produktif lebih besar daripada penduduk yang usia nonproduktif. Karena penduduk yang usia nonproduktif atau penduduk sudah tidak bekerja/belum bekerja dianggap sebagai beban. Oleh karena itu, beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atas penduduk usia nonproduktif dalam memenuhi kebutuhan tidak terlalu besar sehingga penduduk usia produktif dapat fokus dalam pekerjaannya.

Tingginya jumlah penduduk usia produktif dan rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif atas penduduk usia nonproduktif juga dapat menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah kemungkinan dikarenakan daerah tidak cukup memiliki lapangan kerja yang sesuai dengan jumlah penduduk usia produktif sehingga tingkat pengangguran akan meningkat. Banyaknya jumlah penduduk usia produktif yang menganggur atau berkerja dengan penghasilan rendah dapat mengurangi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah tetap rendah dan tidak berkontribusi pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Penduduk usia produktif yang bekerja dengan penghasilan rendah juga disebabkan produktivitas tenaga kerja yang rendah akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia atau memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang minim. Jumlah ibu hamil pada penduduk usia produktif juga menjadi indikator tidak berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah karena menurunnya produktivitas. Pada wilayah gerbangkertosusila mencapai rata-rata sekitar 159.000 dari tahun 2019-2023 yang diperoleh dari laporan profil kesehatan pada dinas kesehatan provinsi jawa timur. Jika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak menjadi konsumen maka ekonomi daerah cenderung tidak berkembang secara mandiri karena kemandirian keuangan daerah lebih dominan pada pajak dan retribusi daerah. Serta apabila sektor produktif lemah, pendapatan asli daerah tetap rendah meskipun jumlah penduduk usia produktif tinggi dan kecilnya beban yang ditanggung atas penduduk jumlah usia nonproduktif.

Pada saat tahun 2020 masa pandemi beberapa daerah Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila mengalami peningkatan rasio ketergantungan karena adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan banyaknya penutupan usaha serta PHK masal berdampak pada masyarakat yang menyebabkan pengangguran karena masyarakat tidak memiliki pendapatan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trimono *et al.*,2023) menyatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 secara nyata telah berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengangguran di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini semakin membuat penduduk usia produktif lebih terbebani dengan memenuhi kebutuhan usia nonproduktif. Sehingga penduduk harus dapat mengurangi pengeluarannya yang dapat membuat kesejahteraan masyarakat belum tercukupi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariasih *et al* (2013) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pertama, hasil dari uji hipotesis pertama (H_1) yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah diterima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah tersebut. Pendapatan asli daerah mempunyai nilai signifikan yaitu 0,000. Hal ini menjelaskan bahwa nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kedua, hasil dari uji hipotesis kedua (H_2) yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang artinya peningkatan atau menurunnya pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai signifikan yaitu 0,072. Hal ini menjelaskan bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Ketiga, hasil dari uji hipotesis ketiga (H_3) yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah ditolak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang artinya bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk usia produktif tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Jumlah penduduk mempunyai nilai signifikan yaitu 0,167. Hal ini menjelaskan bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Oleh karena itu, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian sebagai berikut:

Pertama, bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian diharapkan menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah dan menambah periode waktu yang terbaru sehingga data yang diperoleh lebih akurat serta menambah objek penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan mengambil data sampel di Provinsi Jawa Timur agar lebih luas atau lebih baik di luar Provinsi Jawa Timur untuk menjadi perbandingan apakah hasil penelitian ini juga berlaku pada Kabupaten/Kota di provinsi lainnya.

Kedua, bagi pemerintah diharapkan dari hasil penelitian yang diperoleh dapat mendorong pemerintah untuk semakin meningkatkan penerimaan daerahnya. Berdasarkan dari hasil penelitian rata-rata kemandirian keuangan daerah sebesar 54,38% yang tergolong partisipatif. Sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah serta pemanfaatan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariasih, N. N. P., I. M. S. Utama, dan I. G. A. P. Wirathi. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. Udayana University.
- Dinas Kesehatan. 2023. *Profil Kesehatan 2023*. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Sembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi)*. Salemba Empat
- Jefri, R. 2018. Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14-28.
- Karouw, T. L., D. S. M. Engka, dan K. D. Tolosang. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dikota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4).
- Malau, E. I., dan E. P. S. Parapat. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BI)*, 3(2), 332-337.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mantra, I. B. 2000. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 12 Maret 2019. Jakarta.
- Pratiwi, L. I., I. B. Riharjo, dan Fidiana. 2018. Flypaper Effect: Analisa Stewardship Pada Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(10).
- Rofiq, I., dan F. I. Arza. 2021. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705-719.
- Samudra, G., dan N. Handayani. 2020. Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Sari, R. P. 2021. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019–2021. (*Financial Ratio Analysis of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to Assess the Financial Performance of the Regional Government of Bangkalan Regency in 2019–2021*) (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Shoba, A. N., dan Fidiana. 2022. Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(5).
- Siregar, A. O., dan I. Mariana. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 1-19.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwito, B. P., dan M. T. Hidayat. 2023. Analisis Kinerja APBD Pemerintah Daerah Di Wilayah Gerbangkertosusila Sebelum (Tahun 2017-2019) Dan Semasa Pandemi Covid 19 (Tahun 2020-2021). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 7757-7765.
- Tarigan, R. 2012. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Tolosang, K. D. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3).
- Trimono, L. R. Y. Putri, dan M. Kristanaya. 2023. Analisis Pengaruh COVID-19 Terhadap Jumlah Pengangguran di Jawa Timur Menggunakan Metode Uji Mean. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DATA* (Vol. 3, No. 1, pp. 222-229).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 02 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- _____. Nomor 1 Tahun 2022 *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. 05 Januari 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta.
- Wahyuni, E., dan L. Ardini. 2018. Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(6).
- Weriantoni, D. I. Yulisra, dan Indriyani. 2024. *Model Rasio Pertumbuhan Ekonomi*. CV. AZKA PUSTAKA.